

## Konsep dan Sistem Manajemen Pembiayaan Pendidikan

<sup>1</sup>Jenal Aripin<sup>2</sup>Mulyawan Safwandy Nugraha

<sup>12</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[jenal3697@gmail.com](mailto:jenal3697@gmail.com) <sup>2</sup>[mulyawan@gmail.com](mailto:mulyawan@gmail.com)

Received: 20-08-2024

Revised: 11-11-2024

Accepted: 18-12-2024

### Abstrak

Pembiayaan pendidikan merupakan salah sistem yang sentral dalam pendidikan, pembiayaan bagian dari pada pendukung penyelenggaraan pendidikan karena menyangkut tentang pembiayaan operasional penyelenggaraan pendidikan dari hal yang terkecil sampai kepada pembiayaan operasional yang besar. Selain itu, manajemen pendidikan yang baik juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana sekolah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah, dan meminimalisir penyelewengan dana sekolah. Penelitian ini menggunakan metode penjelasan deskriptif melalui *library research* yang berhubungan dengan konsep dan sistem manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan memiliki tiga tahapan penting yaitu perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penilaian (evaluasi), ketiga tahapan tadi apabila diterapkan dalam manajemen keuangan adalah menjadi tahap perencanaan keuangan (budgeting), dan tahap pelaksanaan (akunting), dan tahap penilaian atau auditing. Dengan sistem manajemen pembiayaan pendidikan diharapkan mampu mendukung, menjamin pengembangan mutu dan kualitas pendidikan dan proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

**Kata Kunci:** *Konsep, Sistem Manajemen, Pembiayaan Pendidikan*

### Abstract

*Education financing is one of the central systems in education, financing is part of supporting the provision of education because it concerns operational financing of the provision of education from the smallest things to large operational financing. Apart from that, good education management can also increase the effectiveness and efficiency of the use of school funds, increase accountability and transparency of school finances, and minimize misappropriation of school funds. This research uses a descriptive explanation method through library research related to the concept and management system of education financing. Education financing management has three important stages, namely planning, implementation stage and assessment (evaluation) stage. When applied to financial management, these three stages are the financial planning (budgeting) stage, the implementation (accounting) stage, and the assessment or auditing stage. With the education financing management system, it is hoped that it will be able to support and guarantee the development of the quality of education and the process of organizing teaching and learning activities.*

**Keywords:** *Concepts, Management Systems, Education Financing*

## PENDAHULUAN

Pendidikan adalah faktor penting dalam untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam proses pendidikan, pendidikan tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dukungan dari biaya yang dapat membantu proses pendidikan, agar pendidikan dapat berjalan dengan baik. Pembiayaan pendidikan merupakan inventasi sumber daya manusia (SDM) jangka panjang. Pembiayaan pendidikan ini sangat diperlukan untuk program sekolah, pengadaan sarana prasarana, gaji guru, gaji pegawai, keperluan untuk menunjang tercapainya visi dan misi sekolah dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kajian manajemen pembiayaan pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi

konsumtif yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar disekolah. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan memerlukan biaya atau dana.

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen penting dan tidak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar disekolah. Dalam rangka pembentukan potensi sumber daya manusia (SDM), penggunaan anggaran atau biaya pendidikan yang efektif dan efisien dapat menghasilkan SDM yang tepat guna dan berhasil. Salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan pendidikan, terletak pada kemampuan SDM dalam mengelola dana yang tersedia dengan mengacu pada kebutuhan pokok dan skala prioritas program pembangunan pendidikan daritahun ke tahun secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan perencanaan program yang ingin dicapai.

Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut sumber-sumber dana, tetapi juga meliputi penggunaan secara efisien. Semakin efisien sistem pendidikan, maka semakin berkurang biaya yang diperlukan untuk mencapai suatu lembaga pendidikan.

Manajemen sebagai suatu disiplin keilmuan yang secara singkat diartikan sebagai proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan madrasah/sekolah. Mengingat pentingnya peran pembiayaan dan keuangan dalam proses pembelajaran, maka tidak dapat dihindari adanya tata kelola keuangan yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan. Tata kelola keuangan ini selanjutnya disebut sebagai manajemen pembiayaan /keuangan.

Dalam Pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan sekolah harus berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan diatas. Mulai dari tahap perencanaan, penggunaan biaya pendidikan, pengawasan serta pertanggungjawaban atas penggunaan biaya pendidikan. Sehingga, dapat membantu mengurangi permasalahan-permasalahan pembiayaan pendidikan yang sering terjadi di lembaga pendidikan sekolah. Dan lembaga pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikannya dengan baik.

## **METODE**

Dalam penulisan penelitian ini, Penulis menggunakan metode deskriptif melalui *library research* yang berhubungan dengan topik pembahasan yaitu konsep dan sistem manajemen pembiayaan pendidikan. Penelitian ini tidak melibatkan populasi atau sampel apapun. Namun, penelitian ini merupakan kumpulan pembahasan dari berbagai sumber bacaan seperti jurnal dan buku yang berkaitan dengan manajemen pembiayaan atau keuangan pendidikan dengan tujuan untuk mendeskripsikan bahasan sebagai laporan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Manajemen Pembiayaan Pendidikan**

Manajemen Pembiayaan adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh suatu badan yang menjalankan kegiatan usahanya. Dalam konsep ini, terdapat tiga tahapan yang perlu dilakukan oleh pihak keuangan sekolah (Arwidayanto, dkk. 2017)

a. *Budgeting* (Penyusunan Anggaran)

Budgeting bertujuan untuk mengidentifikasi tujuan penyusunan anggaran, menentukan prioritas, menjabarkan dan menganalisis biaya operasional secara alternatif.

Bentuk-bentuk Penyusunan Anggaran meliputi anggaran perbutir, anggaran perprogram dan anggaran berdasarkan hasil

b. *Accounting* (Pembukuan)

Proses kedua dari sistem pembiayaan ini dilakukan setelah anggaran keuangan tersusun dan sekolah telah menerima saluran dari sumber dana. Selain melakukan pencatatan keuangan,

*Accounting* juga berisi beberapa kegiatan lainnya seperti; penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan sekolah

c. *Auditing* (Pemeriksaan)

Proses *auditing* merupakan proses pertanggungjawaban bendaharawan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penggunaan dana sekolah. *Auditing* juga bertujuan untuk mengukur kinerja dan tingkat efektivitas kerja, serta meningkatkan rasa tanggung jawab bendahara sekolah (Makmun, 2010).

Dalam manajemen terdapat prinsip-prinsip yang harus dijalankan agar pengelolaan aktifitas manajerial dapat berjalan sukses. Prinsip-prinsip umum manajemen seperti pandangan Henry Fayol adalah asas pembagian kerja, asas Wewenang dan tanggungjawab, Asas disiplin, Asas kesatuan perintah, Asas kesatuan jurusan atau arah, Asas kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, Asas pembagian gaji yang wajar, Asas pemusatan wewenang, Asas hierarki atau asas rantai berkala, Asas keteraturan, Asas keadilan, Asas inisiatif, Asas kesatuan, Asas kestabilan masa jabatan.

Manajemen yang mengkaitkan pemerolehan (*acquitition*), pembiayaan/pembelanjaan (*financing*) dan manajemen aktiva dengan tujuan secara menyeluruh dari suatu perusahaan. Semua kegiatan/aktivitas perusahaan yang bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin.

Hal yang wajib yang harus dilakukan oleh seorang manajer keuangan adalah mengelola segala unsur dan segi keuangan dalam suatu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Oleh kerana itu manajer keuangan harus mengetahui berbagai aktivitas manajemen keuangan, khususnya penganalisisan sumber dana dan penggunaannya untuk merealisasikan keuntungan maksimum bagi perusahaan.

Menurut Mulyono (2010: 84- 92) ada tujuh konsep yang terkait dengan pembiayaan yang meliputi:

a. Objek Biaya

Objek biaya adalah akumulasi biaya dari berbagai aktivitas. Yang menjadi objek biaya dalam lembaga pendidikan adalah jasa pendidik.

b. Informasi Manajemen Biaya

Informasi manajemen biaya adalah suatu konsep yang mencakup segala informasi yang dibutuhkan dalam mengelola keuangan agar berjalan secara efektif dan efisien. Informasi manajemen biaya berfungsi untuk menentukan harga, mengubah produk jasa atau jasa dalam rangka meningkatkan profitabilitas, memperbaharui fasilitas layanan pada saat yang tepat dan menentukan metode. Layanan informasi manajemen biaya sangat diperlukan sebab terkait terhadap empat hal yaitu:

1. Manajemen strategis yaitu untuk membuat keputusankeputusan strategis yang tepat untuk peralihan produk, metode proses, teknik dan saluran pemasaran, dan hal-hal yang bersifat jangka pendek.
2. Perencanaan dan pengambilan keputusan yaitu untuk mendukung keputusan yang terus menerus dilakukan.
3. Pengendalian manajemen dan operasional yaitu memberikan dasar yang wajar dan efektif untuk mengidentifikasi operasi yang tidak efisien.
4. Penyusunan laporan keuangan yaitu untuk memberikan catatan yang akurat tentang persediaan dan aset lainnya.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah bagaimana cara mencari dana atau sumber dana atau bagaimana menggunakan dana tersebut.

d. Keuangan

Keuangan adalah seni untuk mendapatkan alat pembayaran. Dalam dunia usaha keuangan meliputi pemeliharaan kas yang memadai dalam bentuk uang atau kredit disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

e. Anggaran

Anggaran adalah alat penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk biaya untuk setiap komponen kegiatan.

f. Biaya

Biaya adalah jumlah uang yang disediakan dan digunakan atau dibelanjakan untuk terlaksananya berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dalam rangka proses manajemen.

g. Pemicu Biaya

Pemicu biaya adalah faktor yang memberi dampak pada perubahan biaya total. Artinya jumlah total biaya sangat dipengaruhi efek terhadap perubahan level biaya total dari obyek biaya.

Moch. Idochi Anwar (2003:123-129) mengemukakan konsep ekonomi yang melandasi pembiayaan pendidikan yaitu:

1. Konsep *Supply-Demand*

Analisis mengenai supply berkaitan erat dengan kemampuan penyediaan tenaga oleh lembaga pendidikan sedangkan analisis demand berkaitan dengan besarnya kebutuhan atau permintaan tenaga yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan melalui program-program tertentu. Konsep ini dalam hubungannya dengan pembiayaan pendidikan terutama nampak dalam analisis mengenai keseimbangan antara besarnya permintaan terhadap hasil-hasil pendidikan. Dengan mengetahui berapa besar output yang harus diusahakan agar dapat memenuhi permintaan. Dengan dasar analisis ini dapat pula diprediksi berapa input yang seharusnya diproses untuk mendapatkan hasil (output) yang dibutuhkan. Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan ini akan menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pendidikan yang pada akhirnya akan berhubungan dengan pembiayaan pendidikan.

2. Konsep Biaya Untuk Pengambilan Keputusan

Ketetapan dalam menghitung biaya akan membantu ketetapan dalam pengambilan keputusan sehingga kebijakan perusahaan atau organisasi akan berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan. Dengan menghitung biaya secara cepat dan tepat dapat memberikan informasi yang benar. Dengan demikian yang diambil akan tepat pula.

### Jenis-jenis Pembiayaan Pendidikan

a. Biaya Langsung (*Direct Cost*) dan Biaya Tidak Langsung (*Indirect Cost*)

Biaya langsung (direct cost) diartikan sebagai pengeluaran uang yang secara langsung membiayai penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Anwar (1991:30). Biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan, contohnya: Biaya-biaya untuk gaji guru dan pengadaan fasilitas belajar mengajar, Gaffar (1991:57). Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri, Fattah (2000:23).

Biaya tidak langsung (*Indirect Cost*) diartikan sebagai biaya yang umumnya meliputi hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikuti pendidikan (earning foregone by students), bebasnya beban pajak karena sifat sekolah yang tidak mencari laba (cost of tax exemption), bebasnya sewa perangkat sekolah yang tidak dipakai secara langsung dalam proses pendidikan serta penyusutan sebagai cermin pemakaian perangkat sekolah yang sudah lama dipergunakan (implicit rent and depreciation) Fattah (2000:24).

b. Biaya Rutin dan Biaya Pembangunan (*Recurrent and Capital Cost*)

Biaya rutin dan pembangunan merupakan bagian dari biaya langsung (*direct cost*). Biaya rutin (*recurrent cost*) adalah biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama satu tahun anggaran. Biaya ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran, pembayaran gaji guru dan personil sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana. Menurut Gaffar (1987:162) biaya rutin dihitung berdasarkan “per student enrolled”. Menurutnya biaya rutin dipengaruhi oleh tiga factor utama, yaitu: rata-rata gaji guru per tahun, rasion guru, murid dan proporsi gaji guru terhadap keseluruhan biaya rutin.

Biaya pembangunan (*capital cost*) adalah biaya yang digunakan untuk pembelian tanah, pembangunan ruang kelas, perpustakaan, lapangan olah raga, konstruksi bangunan, pengadaan perlengkapan mobilair, biaya penggantian dan perbaikan. Menurut Gaffar (1987:165) biaya pembangunan dihitung atas dasar “per student place”. Menurutnya dalam menghitung biaya pembangunan ada beberapa factor yang harus dipertimbangkan, yaitu: tempat yang menyenangkan untuk murid belajar, biaya lokasi atau tapak (*site*), dan biaya perabot dan peralatan.

c. *Biaya Pribadi dan Biaya Masyarakat (Private and Social Cost)*

Biaya pribadi (*private cost*) adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dan termasuk di dalamnya *forgone opportunities*. Dalam kaitan ini Jones (1985:5) mengatakan “*in the context of education these include tuitions, fees and other expenses paid for by individuals*”. Dengan kata lain biaya pribadi adalah (di dalamnya termasuk biaya pribadi).

Dalam kaitan ini Jones (1985:5) mengatakan “*Sometimes called public cost, the include cost of educations financed through taxation. Most public school expenses are examples of social costs*”. Dengan kata lain biaya masyarakat adalah biaya sekolah yang dibayar oleh masyarakat. Biaya pribadi adalah jenis biaya yang masih sering dikeluhkan masyarakat Indonesia berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua peserta didik.

d. *Monetary Cost dan Non Monetary Cost*

*Monetary cost* adalah semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan. Sedangkan *non monetary cost* adalah semua bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang, meskipun dapat dinilai ke dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan, misalnya materi, waktu, tenaga, dan lain-lain.

## **Prinsip-prinsip Pembiayaan Pendidikan**

Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu, efektifitas, juga perlu mendapatkan penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi.

### **1. Transparansi**

Transparansi berarti adanya keterbukaan. Transparansi di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan program pendidikan disekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah,

masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui sejumlah uang dan penggunaannya yang diterima sekolah dari orang tua siswa. Perolehan informasi ini manambah kepercayaan orang tua siswa terhadap madrasah.

## 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan rencana kegiatan sekolah yang telah ditetapkan dan juga peraturan yang berlaku, maka pihak sekolah membelanjakan uang sesuai peruntukannya serta dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu: 1) Adanya transparansi para penyelenggaraan sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah. 2) Adanya standar kinerja jadi setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya. 3) Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

## 3. Efektifitas

Efektif sering diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektifitas apabila kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktifitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

## 4. Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu dan biaya. Hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut:

- a. Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Kegiatan dapat dikatakan efisien apabila penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. Ragam efisiensi dapat dijelaskan melalui hubungan antara penggunaan waktu, tenaga, biaya, dan hasil yang diharapkan.
- b. Dilihat dari segi hasil. Kegiatan dapat dikatakan efisien apabila dalam penggunaan waktu, tenaga, dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.

## **Sistem Manajemen Pembiayaan Pendidikan**

Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem berasal dari bahasa Latin *systema* dan bahasa Yunani *sustema* adalah satu kesatuan yang terdiri komponn atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem juga merupakan kesatuan bagian- bagian yang saling berhubungan yang berada dalam satu wilayah serta memiliki item- item penggerak.

Menurut Jerry Fitz Gerald sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berkaitan, berkumpul secara bersama - sama agar dapat menjalankan suatu kejadian atau mencapai tujuan tertentu. Jadi sistem adalah suatu aktifitas pelaksanaan dan penerapan suatu pengetahuan yang telah diketahui sebelumnya. Pembiayaan pendidikan pada suatu lembaga biasa dikenal dengan keuangan. Berkaitan dengan pembiayaan, maka sistem keuangan pada hal ini adalah serangkaian aktifitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga pendidikan/ yayasan dalam rangka mengoptimalkan keuangan pada lembaga pendidikan.

Manajemen memiliki tiga tahapan penting yaitu perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penilaian (evaluasi), ketiga tahapan tadi apabila diterapkan dalam sistem manajemen keuangan adalah menjadi tahap perencanaan keuangan (budgeting), dan tahap pelaksanaan (akunting), dan tahap penilaian atau auditing.

#### 1. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan (*Budgeting*)

Penganggaran merupakan langkah penyusunan anggaran yang amat penting dalam bidang pendidikan, karena pada dasarnya termasuk jasa yang langka sehingga untuk memperolehnya di perlukan pengorbanan. Jamaludin menyatakan anggaran adalah sejenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan dalam bentuk angka-angka dari uang dalam bentuk angka-angka dari uang untuk jangka waktu tertentu. Pada dasarnya, penyusunan merupakan negosiasi atau perundingan/kesepakatan antara puncak pimpinan dengan pimpinan dibawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran.

Fungsi anggaran disamping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian, juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga menempatkan organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah. Harjanto menyebutkan bahwa perencanaan proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Sementara itu, dalam proses penyusunan perencanaan pembiayaan sekolah, sekolah telah sepenuhnya melakukan kegiatan yang dalam perencanaan pembiayaan sekolah sebagaimana diungkapkan oleh Mulyasa bahwa perencanaan pembiayaan sekolah sedikitnya mencakup dua kegiatan, yakni penyusunan anggaran dan pengembangan Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS).

#### 2. Akuntansi (*Accounting*)

Ditinjau dari sudut pandang pemakainya, akuntansi dapat di artikan sebagai suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengavaluasi kegiatan- kegiatan suatu organisasi.

Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi. Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan akuntansi merupakan tugas yang kompleks dan menyangkut berbagai kegiatan. Pada dasarnya, akuntansi harus:

- a. Mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil.
- b. Memroses atau menganalisis data yang relevan.
- c. Mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Peran dan fungsi akuntansi dalam dunia pendidikan adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam entitas pendidikan.

#### 3. Evaluasi (*Controlling*)

Pengawasan keuangan sekolah harus dilakukan melalui aliran masuk dan keluar uang yang dibutuhkan oleh bendahara. Hal itu dilakukan mulai dari proses keputusan pengeluaran pos

anggaran, pembelanjaan, perhitungan dan penyimpanan barang oleh petugas yang ditunjuk. Secara administrasi pembukuan setiap pengeluaran dan pemasukan setiap pengeluaran dan pemasukan setiap bulan ditangani sebagai berita acara. Kepala sekolah sebagai atasan langsung bertanggung jawab penuh atas pengendalian, sedangkan pengawasan dari pihak berwenang, melalui pemeriksaan yang dilaksanakan oleh instansi vertikal, seperti petugas dari Dinas Pendidikan dan BAWASDA.

Evaluasi merupakan tahap terakhir setelah tahap perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi. Evaluasi didefinisikan oleh Nanang Fattah sebagai proses pembuatan pertimbangan menurut suatu perangkat criteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Fattah juga mengemukakan bahwa diantara tujuan evaluasi adalah untuk:

- a. Memperoleh dasar bagi pertimbangan akhir suatu periode kerja, apa yang telah dicapai, dan apa yang perlu mendapat perhatian khusus.
- b. Menjamin cara kerja yang efektif dan efisien yang membawa organisasi kepada penggunaan sumber daya pendidikan (manusia atau tenaga, sarana dan prasarana, biaya) secara efisien dan ekonomis.
- c. Memperoleh fakta tentang kesulitan, hambatan, penyimpangan dilihat dari aspek tertentu seperti program tahunan, kemajuan belajar.

Pengawasan tersebut relatif dilihat dari tugas rutinitas atas dasar kewenangan pengawasan pembiayaan yang masuk dan diserap di sekolah. Prosedur pengendalian penggunaan alokasi anggaran sifatnya sangat normatif administratif artinya pemenuhan pengendalian masih terbatas pada angka kuantitatif yang terdokumentasi. Dengan demikian aspek-aspek realistik penggunaan sulit diukur secara obyektif. Persoalan tersebut sering terjadi di setiap sekolah. Hal tersebut disebabkan belum berjalannya fungsi administrasi keuangan dimana aliran uang dan barang teridentifikasi sesuai dengan peran dan fungsi.

Fungsi evaluasi pada masing-masing tahap berbeda satu sama lainnya. Evaluasi sering dilihat sebagai upaya pencegahan. Ia bertujuan untuk menemukan apa yang benar dan apa yang salah, serta menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pencegahan dari kesalahan agar tidak terulang kembali merupakan fungsi evaluasi yang valid, namun ia memiliki kekurangan yang mendasar. Evaluasi dan pertanggung jawaban keuangan sekolah dapat diidentifikasi ke dalam tiga hal, yaitu pendekatan pengendalian penggunaan alokasi dana, bentuk pertanggung jawaban keuangan sekolah, dan keterlibatan pengawasan pihak eksternal sekolah.

## **KESIMPULAN**

Pembiayaan pendidikan merupakan salah sistem yang sentral dalam pendidikan, pembiayaan bagian dari pada pendukung penyelenggaraan pendidikan karena menyangkut tentang pembiayaan operasional penyelenggaraan pendidikan dari hal yang terkecil sampai kepada pembiayaan operasional yang besar. Selain itu, manajemen pendidikan yang baik juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana sekolah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah, dan meminimalisir penyelewengan dana sekolah.

Manajemen pembiayaan pendidikan memiliki tiga tahapan penting yaitu perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penilaian (evaluasi), ketiga tahapan tadi apabila diterapkan dalam manajemen keuangan adalah menjadi tahap perencanaan keuangan (budgeting), dan tahap pelaksanaan (akunting), dan tahap penilaian atau auditing. Dengan sistem manajemen pembiayaan pendidikan diharapkan mampu mendukung, menjamin pengembangan mutu dan kualitas pendidikan dan proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

## REFERENSI

- Anwar, Moch Idochi. (2003). *Administrasi, Pendidikan dan Manajemen Biaya. Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Arwildayanto dkk. (2017) *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan: Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA) Akselerasi Pemerataan dan Peningkatan Jenjang Layanan Pendidikan di Provinsi Gorontalo*. Padjadjaran: Widya.
- Ferry Fitz Gerald, Andra F. FitzGerald, Warren D. Stalling Jr. (1981). *Fundamental of. System Analysis*. New York.
- Fatah, Nanang. (2000). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Gaffar. (1987). *Perencanaan Pendidikan Teori dan Metodologi*. Jakarta: P2LPTK.
- Hallak, J. (1985). *Analisis Biaya dan Pengeluaran Untlke Pendidikanun*. Paris: International Institute For Planning, UNESCO.
- Indra Bastian. (2007). *Akuntansi Pendidikan*. Jakarta: Erlangga, 2007
- Masditou. (2017). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang bermutu*. *Jurnal Ansiru PAI* Vol. 1 No 2
- Mulyono. (2010). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group. h. 1.
- Saefullah. (2012). *Manajemen Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia,11
- Susilawaty (2016). *Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pengelolaan Pembiayaan Sekolah, SD Negeri 4 Kota Banda Aceh*. *Jurnal Unsyiah*
- Teguh Eko Atmaja. (2016). *Analisis Penetapan Standar Biaya Pendidikan Pada SMANegeri 2 Kuala Kabupaten Nagan Raya*. *Jurnal Administrasi Pendidikan: Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI. (2010). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. h. 257.
- Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.